



## RINGKASAN

KHALICHEA INDRIA WARDANI. Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok (*Accounting System for the Receipt of Land and Building Tax at Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Berdasarkan data pada *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar. Salah satu jenis pajak adalah pajak daerah. Pajak daerah berperan dalam membangun suatu daerah, karena pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah, salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar kesejahteraan masyarakat merata. Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat optimal.

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini yaitu mengetahui fungsi terkait, mengetahui dokumen yang berkaitan, menguraikan bagan alir, menguraikan catatan akuntansi, dan menguraikan pengendalian internal terkait dengan penerimaan PBB-P2. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan tugas akhir ini dengan metode wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

Fungsi terkait Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya Bagian Sub Bidang Penagihan, Bagian Sub Bidang Intesifikasi dan Ekstenfikasi, Bagian Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, serta Kepala Bidang Pajak Daerah II. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB-P2), Surat Permohonan, Form SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak), Surat Pernyataan, dan Surat Permohonan. Kemudian untuk bagan alirnya meliputi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Penagihan PBB-P2, dan Pembayaran PBB-P2. Catatan akuntansi yang digunakan pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk jurnal pada LRA dan LO. Serta adanya pengendalian internal antara lain Lingkungan Pengendalian di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Aktivitas Pengendalian di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Penilaian Risiko, Penyampaian Informasi atau Komunikasi, dan Kegiatan Pemantauan oleh BPK.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa sistem akuntansi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Depok sudah memiliki fungsi dan wewenang masing-masing tanpa adanya bagian yang merangkap tugasnya. Serta dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak adanya proses yang terlewat.

Kata kunci: Sistem Akuntansi, Penerimaan Pajak, PBB-P2, Pajak Daerah, Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.